

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A.M. Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Boedi Harsono. 2020. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harmaizar Z. 2008. *Menangkap Peluang Usaha*. Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa.
- Irwansyah. 2022. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2016. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kotijah, Siti. 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. Samarinda: CV. MFA.
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Puang, R. Victorianus M. H. Randa. 2015. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sinulingga. 2005. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers,.
- Sofi Puspa Sari dan Sutaryono. 2022. *Integrasi Agraria-Pertanahan dan Tata Ruang menyatukan status tanah dan fungsi ruang*, Yogyakarta: Penerbit Ombak,
- Suratman. Hayat. dan Umi Salamah. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang: PT. Refika Aditama,

- Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. 2019. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ten Berge, Mr. J.B J.M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Jakarta: Yuridika.
- Van Dunne, J.M. dan van der Burght, Gr. 1988. *Perbuatan Melawan Hukum*. Ujungpandang: Proyek Hukum Perdata.

Tesis,Jurnal,Literasi

- Anindita Dinar Susanti. 2021. "Kajian Izin Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daratan Bagi Perizinan Berusaha." *Jurnal Ilmiah*, Vol. 14 No. 3, Semarang.
- Arnowo, H. 2023. "Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan." *Widya Bhumi*, Vol. 3 No. 2, Bogor.
- Enggarani, N. S. 2016. "Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di PTSP Kantor BPMP2T Kabupaten Boyolali." *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1 No. 1, Surakarta.
- Hastri, E.D., Rachman, A.M.I., & Shafarinda, R. 2022. "Sanksi Hukum dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman." *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 9 No. 1, Sumenep.
- H. Riyanto. 2020. "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 2.
- Husen Maulana. 2023. *Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non-UMK di Kabupaten Bekasi*. Jurnal Widyaishwara Indonesia, Vol. 4, No. 3. Diakses dari <https://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/197/92>
- Indra, S.R. & Indra, F.R.N. 2022. "Pengelolaan Izin Lokasi untuk UMKM." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 8, Surabaya.
- Junef, M. 2021. *Penegakkan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 17 No. 4
- Mario Julyano & Sulistyawan, A. Y. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mayasari, I. 2019. "Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Pasca OSS." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No. 3, Jakarta.
- Prayogo, R. Tony. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2.

Putra, R. Y., Widodo, D. A., & Nurhasanah, I. 2020. "Efektivitas OSS dalam Perizinan Usaha Mikro", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 10 No. 1.

Omnibus Law dan Lingkungan Yang Berkelanjutan: Perizinan Pendirian Perumahan dan Kawasan Pemukiman." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3 (3) (September–Desember): —. Diakses via jurnal.untirta.ac.id

Sarbini Sarbini, Ria Wierma Putri, Kasmawati Kasmawati, dan Daryanti Haidar. **2023**. "Omnibus Law dan Lingkungan Yang Berkelanjutan: Perizinan Pendirian Perumahan dan Kawasan Pemukiman." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* Vol. 3

Sitorus, O. 2016. "Penataan Hubungan Hukum Agraria." *Jurnal Bhumi*, Vol. 2 No. 1, Yogyakarta.

Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330.

Sumber Internet

Akram, Pandu. *Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>

ET Consultant. *Pentingnya Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Bagi Pelaku Usaha*. <https://et-consultant.com/id/blog/pkkpr-untuk-perizinan-berusaha-dan-kepatuhan-tata-guna-lahan>

Hukumonline. *Tanggung Jawab Pemegang KKPR atas Lahan yang Belum Dibebaskan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pemegang-kkpr-atas-lahan-yang-belum-dibebaskan-lt6662b5b517a4f/>

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. 2022. *PNBP Penerbitan KKPR*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/tak-kenal-maka-tak-tahu-seri-layanan-pnbp-penerbitan-kkpr>

Merdeka.com. *Nawacita: 9 Agenda Prioritas Pemerintah Jokowi-JK*. <https://www.merdeka.com/jatim/nawacita-adalah-9-agenda-prioritas-pemerintahjokowi-jk-ini-penjelasan-nya-kln.html>

PNPC Lawyer. *“Pentingnya Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Bagi Pelaku Usaha.”* Tersedia secara daring di: <https://pnpclawyer.com/pentingnya-konfirmasi-kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-bagi-pelaku-usaha/>.

Wonkdermayu. *Hukum Perizinan*.
<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan>
eJournal IWI. <https://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/197/92>